

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Merujuk pada hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan, maka kesimpulan penelitian dan pengembangan ini adalah:

Model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik yang dikembangkan, telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran, dan terbukti lebih baik dibandingkan model konvensional yang sudah ada untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.

Secara rinci kesimpulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi pembelajaran PKn di SMA yang telah dilaksanakan selama ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa.

Kondisi pembelajaran PKn yang telah dilaksanakan selama ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya, dan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PKn tersebut terkendala oleh persepsi guru dan siswa mengenai materi PKn yang mudah dan harus dihafal oleh siswa. Sehingga guru tidak merasa perlu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, sehingga menyebabkan orientasi pembelajaran hanya pada isi (konten), mengabaikan proses pembelajaran yang sesungguhnya lebih penting

dibandingkan dengan isi (*content*) itu sendiri. Tujuan pembelajaran belum secara komprehensif mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Inovasi pengembangan sumber dan media yang terbatas juga menyebabkan pelaksanaan pembelajaran PKn tidak beranjak dari tradisi *transfer of knowledge*. Demikian pula dengan evaluasi pembelajaran, masih mengutamakan evaluasi hasil, dan sebagian besar hanya pada aspek kognitif.

2. Desain perencanaan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik memerlukan perencanaan yang baik, agar dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Model pembelajaran "IKKP" membutuhkan perencanaan yang baik, terutama karena model ini mengutamakan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran, daripada kegiatan guru yang hanya memerankan sebagai motivator dan fasilitator. Desain perencanaan model pembelajaran "IKKP" dituangkan dalam RPP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.

Komponen pokok RPP model pembelajaran "IKKP" terdiri dari: (1) identitas matapelajaran, (2) tema, (3) indikator, (4) tujuan pembelajaran, (5) materi pembelajaran, (6) pendekatan, (7) strategi dan metode, (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang memuat tujuh tahapan

model pembelajaran "IKKP", (9) media dan sumber, (10) alat/sarana berupa LKS, dan (11) evaluasi.

Khusus mengenai rumusan tujuan, model pembelajaran "IKKP" meliputi empat aspek tujuan, yaitu (1) pengetahuan tentang kebijakan publik, (2) kemampuan dasar mengenai isu-isu kontroversial kebijakan publik, (3) sikap terhadap isu-isu kontroversial kebijakan publik, dan (4) keterampilan menganalisis isu-isu kontroversial kebijakan publik.

3. Pelaksanaan pembelajaran yaitu langkah-langkah (sintak) model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik terdiri dari tujuh tahapan, agar dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pelaksanaan pembelajaran atau langkah-langkah (sintak) model pembelajaran "IKKP" terdiri dari tujuh tahapan, yaitu: (1) orientasi isu, (2) memilih isu, (3) mengidentifikasi nilai, (4) menentukan dan mengeksplorasi sikap, (5) membandingkan dan mempertentangkan nilai, (6) mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan, dan (7) refleksi. Dari ketujuh tahapan tersebut dua tahap lebih berfokus pada aktivitas guru, yaitu tahap orientasi isu dan tahap refleksi. Tiga tahap berfokus pada aktivitas siswa secara kelompok, yaitu tahap memilih isu, mengidentifikasi nilai, dan menentukan-mengeksplorasi sikap. Dan dua tahap berfokus pada aktivitas siswa secara individual, yaitu tahap membandingkan-mempertentangkan nilai, dan tahap mengidentifikasi-mengekspresikan perasaan.

4. Prosedur evaluasi model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik terdiri dari evaluasi proses dan hasil, agar dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa berbasis rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Model pembelajaran "IKKP" tidak diorientasikan hanya untuk keberhasilan siswa menguasai materi, melainkan terdapat aspek-aspek lain, yaitu mengembangkan kemampuan dasar, mengembangkan sikap, dan mengembangkan keterampilan terkait isu-isu kontroversial kebijakan publik. Oleh sebab itu evaluasi dalam model pembelajaran "IKKP" meliputi evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi proses lebih ditujukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kegiatan kelompok dan individual, evaluasi hasil belajar ditujukan untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan. Selain itu penilaian terhadap portofolio kelompok maupun individu juga dapat dilakukan berdasar pada hasil pekerjaan siswa sebagaimana dituangkan dalam LKS.

5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

Pada aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) hasil penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran "IKKP" berhasil beranjak dari tradisi pembelajaran PKn yang kurang bermakna bagi siswa yang disebabkan oleh masih dominannya penerapan metode

pembelajaran konvensional (*transfer of knowledge*) seperti *ground covering technique*, indoktrinasi, dan *narrative technique*.

6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

Model pembelajaran "IKKP" berpengaruh signifikan pada peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Artinya, model pembelajaran "IKKP" memenuhi sebagai sebuah model pendidikan demokrasi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan salah satu tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional.

7. Terdapat perbedaan yang signifikan pada watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

Model pembelajaran "IKKP" terbukti berpengaruh signifikan pada peningkatan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Model pembelajaran "IKKP" menempatkan nilai sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Nilai tidak hanya diidentifikasi, akan tetapi juga dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan. Oleh karena itulah model pembelajaran "IKKP" memenuhi sebagai model pendidikan nilai-moral.

8. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa antara yang menerapkan model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik dengan yang menerapkan model konvensional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran "IKKP" terbukti signifikan dalam meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian model pembelajaran "IKKP" memenuhi sebagai wahana untuk pembangunan watak bangsa atau pendidikan karakter bangsa.

9. Siswa dan guru memberikan tanggapan yang baik terhadap implementasi model pembelajaran isu-isu kontroversial kebijakan publik.

Guru yang terlibat langsung dalam implementasi model pembelajaran "IKKP" menyatakan bahwa model pembelajaran "IKKP" Sangat Sesuai dan Cukup Sesuai untuk diintegrasikan dalam pembelajaran PKn. Tidak satupun responden menjawab pada kategori Kurang Sesuai dan Tidak Sesuai. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran "IKKP" memiliki peluang sangat besar untuk dapat diadaptasi, diterapkan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh para guru PKn di sekolah.

Siswa juga memberikan tanggapan yang baik terhadap model pembelajaran "IKKP" yang dikembangkan. Hasil analisis menunjukkan

seluruh indikator diperoleh nilai baik, bahkan untuk indikator ketertarikan terhadap kontekstualisasi materi diperoleh nilai sangat baik. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa siswa juga memberikan dukungan dan apresiasinya terhadap model pembelajaran "IKKP" yang dikembangkan. Dan dukungan tersebut menguatkan indikasi bahwa model pembelajaran "IKKP" yang dikembangkan ini akan mudah dalam adaptasi dan implementasinya di lapangan. Mengingat model pembelajaran "IKKP" ini sangat membutuhkan partisipasi siswa yang besar baik pada kegiatan kelompok, maupun individual, maka dukungan siswa yang baik terhadap model ini sangat diharapkan.

B. Implikasi

Kesimpulan hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis maupun teoritis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Implikasi Praktis

Implikasi praktis hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, guru harus mengubah tradisi pembelajaran PKn sebagai *transfer of knowledge* yang selama ini digunakan. Guru harus mengubah tradisi menghafal materi atau pembelajaran yang berorientasi pada isi, menjadi pembelajaran yang berorientasi pada tradisi berpikir, berdiskusi,

berdebat, mengeksplorasi sumber, membandingkan nilai, dan menimbang perasaan. Dengan mengubah tradisi tersebut diharapkan pembelajaran PKn menjadi lebih bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang, dan aktif.

Kedua, model pembelajaran "IKKP" dikembangkan untuk dapat memenuhi keinginan agar pembelajaran PKn bersifat utuh (kaffah), maka dalam perencanaan pembelajaran, khususnya perumusan tujuan pembelajaran hendaknya juga meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan proporsi ideal masing-masing aspek tersebut.

Ketiga, prosedur pelaksanaan model pembelajaran "IKKP" dirancang melalui langkah-langkah yang lebih mengutamakan aktivitas siswa, dan mengurangi dominasi guru. Oleh karena itu diperlukan kemauan guru untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh dalam kegiatan siswa secara individual maupun kelompok, terutama agar potensi dan kemampuan siswa dapat diekspresikan secara maksimal melalui aktivitas belajar.

Keempat, implikasi dari prosedur penilaian pada model pembelajaran "IKKP" mensyaratkan guru untuk menggunakan cara evaluasi yang bervariasi dalam pembelajaran PKn. Untuk itu diperlukan kemampuan guru dalam mengembangkan instrumen-instrumen evaluasi,

khususnya evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar untuk aspek sikap dan keterampilan.

Kelima, model pembelajaran "IKKP" terbukti berpengaruh signifikan untuk meningkatkan keterampilan dan watak kewarganegaraan siswa. Oleh karena itu pembelajaran PKn di SMA harus mengadopsi model pembelajaran "IKKP". Khususnya untuk SK: Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (kelas XI, semester gasal). Namun demikian guru dapat mempertimbangkan untuk SK/KD lain di kelas lain jika dipandang karakteristiknya sesuai dengan model pembelajaran "IKKP". Misalnya: SK: Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional, KD: 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, 2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (kelas X, semester gasal). KD: Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia (kelas XII, semester gasal).

Keenam, keinginan guru dan siswa untuk mengadopsi model pembelajaran "IKKP" harus dihargai dan didukung semua pihak. Khususnya manajemen sekolah harus memberikan dukungan, setidaknya berupa apresiasi positif terhadap guru PKn yang mau melakukan inovasi pembelajaran. Apresiasi positif tersebut tidak hanya akan bermanfaat untuk menguatkan motivasi guru PKn, melainkan juga untuk

menumbuhkan motivasi guru lain, khususnya untuk guru-guru non-eksakta yang selama ini cenderung kurang aktif berinovasi.

2. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil-hasil penelitian ini berimplikasi sebagai berikut:

Pertama, pembelajaran PKn harus beranjak dari tradisi "*education about citizenship*" menuju "*education through citizenship*" dan "*education for citizenship*". "*Education about citizenship*" adalah konsepsi pendidikan kewarganegaraan yang memusatkan perhatian pada memberikan bekal kepada siswa berupa pengetahuan tentang struktur pemerintahan dan kehidupan politik. "*Education through citizenship*" adalah konsepsi pendidikan kewarganegaraan yang mengutamakan prinsip pelibatan siswa secara aktif dalam belajar dan bekerja, serta pengalaman partisipatif di sekolah maupun di masyarakat. Sedangkan "*education for citizenship*" mengutamakan pada proses pembentukan dan pengembangan kompetensi siswa (pengetahuan, pemahaman, sikap, keterampilan, nilai dan disposisi) yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dan memiliki kesadaran atas peran dan tanggungjawabnya di dalam kehidupan.

Kedua, dalam menyusun perencanaan pembelajaran PKn guru harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran PKn. Karena perencanaan yang baik akan berimplikasi pada pelaksanaan

pembelajaran, dan akhirnya pada hasil pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diupayakan untuk dikembangkan guru diantaranya adalah prinsip pembelajaran menurut Stahl (2008:2). Dari hasil sebuah penelitian berjudul *A Vision of Powerful Teaching and Learning in the Social Studies: Building Social Understanding and Civic Efficacy*, dinyatakan bahwa "*Social studies teaching and learning are powerful when they are meaningful, integrative, value-based, challenging and active*). Pembelajaran PKn akan potensial (*powerful*) jika dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip: bermakna, integratif, berbasis nilai, menantang, dan aktif. Sehingga pembelajaran PKn akan mengarah menuju pembentukan warganegara multidimensional (*multidimensional citizenship*) sebagaimana yang saat ini diwacanakan.

Ketiga, implementasi pembelajaran PKn dalam rangka membentuk siswa "*to be a good citizenship*", dalam pengembangan materi, pendekatan, strategi, metode, sumber dan media pembelajaran, dapat mendukung tiga tradisi *Social Studies*, yaitu: tradisi "*citizenship transmission*", "*social sciences*" dan "*reflective inquiry*". Sedangkan kaitannya dengan pendidikan nilai, implementasi pembelajaran PKn harus dapat mendukung fungsi PKn sebagai pendidikan yang bertujuan mengembangkan nilai, moral dan kebajikan (*values education, moral education for virtues*). Dalam menerapkan pendekatan dan strategi pembelajarannya juga harus melibatkan siswa secara aktif, karena "*... values is neither taught nor cough, it is learned*". Kaitannya dengan

pendidikan untuk membangun karakter bangsa (*nation and character building*) atau "*educating for character*" harus memperhatikan tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior* melalui proses pendidikan yang terpadu utuh, yang disebut sebagai *confluent education*.

Keempat, implikasi teoritis yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran adalah penerapan *authentic assessment* dalam pembelajaran PKN. Pelaksanaannya menggunakan berbagai jenis penilaian, seperti unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan penilaian diri (*self-evaluation*). Dengan menerapkan *assessment authentic* penilaian dalam pembelajaran PKN sebagaimana diharapkan selama ini dapat diwujudkan.

Kelima, model pembelajaran "IKKP" terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan, watak kewarganegaraan, serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air, karena menerapkan kombinasi strategi *Self-Regulated Learning* (SRL) dan *Cooperative Learning* (CL). *Self-regulated learning* menempatkan kesanggupan siswa secara personal merancang sendiri strategi belajar dan mengelola lingkungan yang kondusif untuk belajar secara mandiri. Sedangkan *Cooperative Learning* siswa belajar mengembangkan kemampuan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Kombinasi strategi pembelajaran yang didasarkan

pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ini terbukti efektif diterapkan dalam model pembelajaran "IKKP".

Keenam, adaptasi model-model pembelajaran oleh guru PKn di sekolah harus diapresiasi positif. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Winatapura (2001:556) bahwa kadar perwujudan kompetensi kewarganegaraan yang nyata saat ini memerlukan pengembangan untuk mendekati kadarnya yang ideal melalui upaya yang sistematis dan sistemik melalui **program kurikuler** dan kegiatan sosial-kultural pendidikan kewarganegaraan. Agar lebih bermakna, pengembangan dan pengorganisasian isi maupun proses berdasarkan dan berorientasi pada kompetensi kewarganegaraan serta karakteristik peserta didik dan lingkungan kehidupan.

C. Rekomendasi

Merujuk pada kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, dikemukakan rekomendasi dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan hasil penelitian ini.

1. Bagi Guru PKn

Pertama, model pembelajaran "IKKP" terbukti dapat meningkatkan keterampilan, watak kewarganegaraan serta rasa kebangsaan dan cinta tanah air secara signifikan. Oleh sebab itu para guru PKn dapat

menerapkan dan mengembangkan model ini di sekolah. Untuk itu diperlukan dukungan dari beberapa pihak agar dapat mencapai hasil yang efektif. Dukungan yang dibutuhkan guru tidak harus berupa sarana prasarana yang mahal, melainkan cukup dengan dukungan berupa motivasi dan apresiasi terhadap guru PKn yang mau melakukan inovasi-inovasi pembelajaran.

Kedua, model pembelajaran "IKKP" menunjukkan karakteristik sebagai pendidikan nilai, pendidikan demokrasi, dan pendidikan untuk pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu kepada para guru hendaknya mau mengembangkannya di kelas agar pembelajaran PKn dapat segera beranjak dari tradisi *transfer of knowledge*. Dengan mengembangkan model pembelajaran "IKKP" secara tidak langsung guru PKn juga telah mengembangkan pendidikan karakter yang saat ini sedang menjadi program dan perhatian banyak kalangan.

Ketiga, pemilihan materi/topik dalam model pembelajaran "IKKP" hendaknya tidak dibatasi atau diarahkan oleh guru. Karena pemilihan topik berdasarkan minat siswa akan mempengaruhi kualitas proses pembahasan selanjutnya. Guru tidak perlu khawatir apakah isu-isu tersebut bernuansa politik, kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan SARA. Justru melalui topik-topik tersebut kita gunakan sebagai sarana pembelajaran PKn yang benar-benar faktual, tidak hanya normatif sebagaimana yang kita harapkan. Kekhawatiran mengenai pembelajaran

menjadi kurang terarah akan dapat diatasi melalui peran guru sebagai fasilitator. Oleh sebab itu bagaimanapun besarnya peran siswa dalam model pembelajaran "IKKP" tetap memerlukan peran guru secara proporsional.

Keempat, pendekatan dan strategi yang dikembangkan dalam model pembelajaran "IKKP" berupaya menyeimbangkan antara aktivitas belajar kelompok dan aktivitas belajar individual melalui strategi SRL dan CL. Dalam pelaksanaannya guru harus memperhatikan kondisi dan karakteristik siswa. Khususnya dalam pelaksanaan strategi kelompok (CL) mengalami kendala terutama pembentukan kelompok yang membutuhkan waktu cukup lama. Terutama akan terjadi jika jumlah siswa dalam kelas melebihi 40 siswa, dan kelas sudah penuh dengan meja-meja.

Kelima, LKS menjadi bagian perangkat pembelajaran yang penting pada model pembelajaran "IKKP". Baik LKS kelompok maupun LKS individual memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung dan mengarahkan aktivitas belajar siswa, dan mengurangi dominasi guru. Terutama untuk LKS kelompok, hendaknya guru tetap memantau apakah aktivitas belajar dalam kelompok-kelompok dapat berlangsung sesuai prinsip-prinsip *cooperative learning*. Hal yang sering terjadi adalah aktivitas dalam kelompok hanya didominasi oleh beberapa siswa.

Keenam, evaluasi proses, evaluasi hasil, maupun portofolio berupa hasil pengisian LKS harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam

menerapkan model pembelajaran "IKKP". Namun demikian yang terpenting bukan pada bagaimana prosedur evaluasi tersebut dilakukan, melainkan pada substansi masing-masing bentuk evaluasi. Evaluasi proses lebih ditujukan untuk mengarahkan agar seluruh siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Evaluasi hasil ditujukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi sesuai tujuan pembelajaran. Sedangkan portofolio yang berbentuk LKS terisi hanya merupakan pelengkap. Namun demikian penting juga terutama untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan siswa mengenai sebuah konsep, pandangan mengenai nilai, norma, moral, dan konsistensi terhadap suatu prinsip.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi para peneliti, khususnya para dosen pengelola program studi PKN dan PIPS, hendaknya dapat mengembangkan lebih lanjut melalui penelitian yang lebih komprehensif, melibatkan para guru secara langsung dalam proses penelitian sejak proses awal. Para dosen hendaknya berkolaborasi dengan guru-guru PKn melalui model penelitian tindakan kelas, atau model penelitian lain yang ditujukan untuk inovasi pembelajaran PKn di sekolah. Dari proses selama penelitian ini sesungguhnya nampak dan terasa adanya keinginan kuat dari para guru PKn untuk melakukan inovasi pembelajaran, namun pada umumnya mereka mengaku masih mengalami kesulitan terutama karena kurang

percaya diri. Dengan berkolaborasi dengan dosen, keinginan tersebut diharapkan akan dapat terpenuhi, disamping sebagai wujud sinergi akademis antara pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi yang mengelola program studi PPKN dan PIPS dapat mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran melalui penelitian yang didasarkan pada kebutuhan nyata pembelajaran di sekolah. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara kampus dan sekolah, jika mungkin tidak hanya dalam bidang penelitian, akan tetapi juga dapat berbentuk dosen/guru tamu, Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta kegiatan-kegiatan insidental lainnya.